

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian berjudul “*Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Provinsi Bali dalam Menghadapi Hoaks Kemunculan Klaster Baru pada Sekolah Tatap Muka*”. Penyebaran berita hoaks, atau yang lebih dikenal dengan berita bohong dengan penuh rekayasa di Pemerintah Provinsi Bali menimbulkan dampak negatif, diantaranya merugikan secara finansial, membuat teror psikososial, hingga dapat merugikan persatuan dan keamanan. Kemunculan hoaks yang beredar ditengah masyarakat Provinsi Bali dilakukan dalam berbagai bentuk, baik video, foto hingga artikel pemberitaan. Oleh karena itu, beredarnya berita hoaks disebut sebagai situasi krisis di Provinsi Bali.

Menghadapi situasi krisis tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melakukan proses manajemen krisis melalui strategi komunikasi yang dilakukan dengan didasari prinsip-prinsip dalam strategi komunikasi krisis, yaitu: 1) Kontak Media Massa: Pemerintah Provinsi Bali hampir memanfaatkan semua media, bahkan memiliki beberapa media secara *official* dari Pemerintah Provinsi Bali seperti Instagram, Youtube, Facebook, Twitter dan Website; 2) Tim Komunikasi: Pemerintah Provinsi Bali memiliki tim khusus dalam melakukan perencanaan yang terkoordinasi dalam pembagian kerja untuk menangani situasi krisis yaitu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas dari Pemerintah Provinsi Bali; 3) Fakta:

Pemerintah Provinsi Bali melalui tim SATGAS khusus memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan membagikan kembali berita yang benar kepada masyarakat melalui media yang digunakan., sekaligus memanfaatkan pemerintah formal maupun informal, termasuk Desa Adat untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat; 4) Konferensi Pers Berkala: Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan Konferensi Pers setiap hari, bahkan adanya penyampaian data terkait hoaks saat Konferensi Pers; 5) Tidak Menutup Informasi: Pemerintah Provinsi Bali memberikan informasi secara adil, baik positif maupun negatif, sekaligus secara transparan memberikan kebaruan pemberitaan mengenai situasi yang terjadi di Bali, apalagi mengenai pandemi COVID-19; 6) Berhati-hati dalam Menyampaikan Informasi: Pemerintah Provinsi Bali mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghindari menyalahkan pihak lain, sekaligus memanfaatkan Banjar dan desa adat dalam penyampaian informasi; 7) Komunikasi Reputasi: Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan media sosial dan pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat untuk meluruskan informasi yang salah dan menjawab kritikan; 8) Komunikasi Empati: Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah menyinggung pihak lain, khususnya masyarakat. Hal tersebut adalah satunya dilakukan dalam penyampaian informasi tanpa terkecuali melalui pemanfaatan berbagai media, seperti media konvensional, yaitu televisi, koran dan radio; dan 9) Perbanyak Saluran Komunikasi: Pemerintah Provinsi Bali terus membangun saluran komunikasi secara lebih luas, sekaligus menggunakan segala sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan media semaksimal mungkin.

B. SARAN

1. Praktis

Peneliti berharap Pemerintah Provinsi Bali lebih berinovasi dalam membuat strategi untuk menghadapi situasi krisis di Bali, terlebih dalam memanfaatkan media yang sudah ada, salah satunya *official* website Provinsi Bali. Peneliti melihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali belum secara aktif dalam membagikan informasi. Peneliti juga berharap komunikasi antar Perangkat Daerah dapat lebih terbuka, untuk menghindari penyampaian informasi yang berbeda.

2. Akademis

Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mendapatkan lebih banyak informasi dari Pemerintah Provinsi Bali dalam hal penyebaran hoaks yang terjadi di Provinsi Bali, serta tidak hanya membahas hoaks seputar pemberlakuan kembali sekolah tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2021, June 25). *Studi Terbaru Ungkap Covid-19 Pertama Muncul di China pada Oktober 2019, Ahli: Bukan Buatan Manusia*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/25/studi-terbaru-ungkap-covid-19pertama-muncul-di-china-pada-oktober-2019-ahli-bukan-buatan-manusia>
- Ali, M. (2009). Studi Tentang Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits: Penelitian Kualitatif Pada MTsN 1 dan 2 di Kota Bandung. *Universitas Pendidikan Indonesia*. <http://repository.upi.edu/10083/>
- Ashari, M. (2020, May 8). *Urgensi Manajemen Krisis di Tengah Kondisi Pandemi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/13068/UrgensiManajemen-Krisis-Di-Tengah-Kondisi-Pandemi.html#:~:text=Dengan%20menerapkan%20manajemen%20krisis%2C%20pengambil,proses%20bisnis%20tetap%20berjalan%20secara>
- Azizah, K. (2021, March 18). *Hoaks Adalah Berita Bohong, Kenali Ciri-ciri, Jenis dan Cara Mengatasinya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/trending/hoaxadalah-berita-bohong-kenali-ciri-ciri-jenis-dan-cara-mengatasinya-kln.html>
- Dewan Pers. (2017). *Berita Dewan Pers Etika (Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers)* (Dewan Pers, Ed.). Dewan Pers. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buletin/646-AGUSTUS%202017.pdf>
- Diskominfo. (2022). *Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya*. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/42985-pengertian-hoax-dan-caramenangkalnya>
- Fakultas Komunikasi & Bisnis. (2021). *Menangkal Hoaks dengan Literasi Digital di New Normal*. Telkom University. <https://scb.telkomuniversity.ac.id/menangkal-hoaksdengan-literasi-digital-di-new-normal/>

- Farisa, F. C. (2021, September 24). *Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/08481821/muncul-klaster-covid-19akibat-ptm-satgas-ingatkan-sekolah-hati-hati>
- Hidayah, Nuril. S. Cahya. S. N. Priska. A. S. Indra. W. A. Ashivini. W. Puradian. D. K. (2020). *Laporan Pemetaan Hoaks Pandemi Covid-19 Tahun 2020* (Nuril. S. Cahya. S. N. Priska. A. S. Indra. W. A. Ashivini. W. Puradian. D. K. Hidayah, Ed.). MAFINDO.
- Indasari, F., & Anggriani, I. (2020). Krisis Komunikasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemberitaan Penyebaran Covid-19 melalui Udara). *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu, Vol 7*(Vol 7 No 1 (2020)).
- Intan, G. (2021, September 27). *Menkes Bantah Kabar Adanya Klaster COVID-19 di Sekolah Akibat PTM*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/menkesbantah-kabar-adanya-klaster-covid-19-di-sekolah-akibat-ptm/6247191.html>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Simbolik dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, Vol. 19(Vol. 19 No. 1 (2018): Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)). <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/1401>
- Juwita, R. (2007). *Komunikasi Krisis dalam Perspektif Teori Sistem dan Media*. Universitas Mulawarman. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5822/Komunikasi Kris is Dalam Perspektif Teori Sistem dan Media.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5822/Komunikasi%20Krisis%20Dalam%20Perspektif%20Teori%20Sistem%20dan%20Media.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Kriyanto, R. (2015). *Public Relations & Crisis Management (Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Krisis & Kualitatif* (R. Kriyanto, Ed.). Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Public_Relations_Issue_Crisis_Management/hey2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
- Listiana, S. (2013). *Partisipasi Masyarakat Pada Pelestarian Tradisi Suran Mbah Demang Sebagai Kearifan Lokal di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman*. <https://eprints.uny.ac.id/18427/>

Mardiyah, S. L., & Salma, A. N. (2021). Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Strategi Komunikasi*

Krisis Humas Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 08. file:///C:/Users/User/Downloads/16595-32632-1-SM.pdf

Milena, S. (2022, February 5). *Kasus Covid-19 Semakin Menjadi, Sekolah Tatap Muka 100% di Bali Diberhentikan*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/article/258489/kasus-covid-19-semakin-menjadi-sekolahtatap-muka-100-di-bali-diberhentikan>

Mulki, S. S. (2001). Strategi Komunikasi Krisis pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Bank Bukopin KCP Cianjur. *Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Vol. 1*(Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Public Relations (JRPR)).

Mustofa. (2020). *Strategi Komunikasi Manajemen Krisis Organisasi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa "First Travel")*. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data>

[_mhs/tugas/1964290004/1233_6_tugas%20paradigma%20baru%20pr.pdf](#)

Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group.

Prabowo, A. B. (2019). *Komunikasi Krisis PT Gojek Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Krisis Driver Service Unit (DSU) Gojek Solo Raya)*. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/<http://eprints.ums.ac.id/70392/3/N>

[ASKAH%20PUBLIKASI%20ARIS%20BUDI%20WIBOWO.pdf](#)

Prastya, N. M. (2016). Komunikasi Krisis di Era New Media dan Social Media. *Universitas Islam Indonesia*, 6(Vol. 6 No. 1).

Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1(Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017). <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>

Purwanto, A. (2020, August 26). *Provinsi Bali*. KompasPedia.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-bali>

- Putranto, W. G. (2021, October 29). *72 Juta Orang Indonesia Sudah Disuntik 2 Dosis Vaksin Covid-19, 34% dari Target Pemerintah*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/10/29/72-juta-orang-indonesia-sudahdisuntik-2-dosis-vaksin-covid-19-34-dari-target-pemerintah>
- Reditya, T. H. (2021, September 3). *Seberapa Penting Peran Media di Tengah Pandemi Covid-19?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/03/162459170/seberapa-pentingperan-media-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>
- Safutra, I. (2020, July 13). *Hasil Survey, Mayoritas Orang Tua Belum Setuju Sekolah Tatap Muka*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/13/07/2020/hasil-survei-mayoritasorang-tua-belum-setuju-sekolah-tatap-muka/>
- Sari, S. (2016). *Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur'an Dengan Menggunakan Metode An-Nahdliyah di TPQ Manba'ul Hikam Kepatihan Tulungagung*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4241/>
- Silviani, I., Pardede, I. F., & Sembiring, D. C. (2020). Komunikasi Krisis dalam New Normal. *Universitas Darma Agung*, 9(Vol. 9 No. 1).
- Tata Ruang. (2022). *Sekilas Bali*. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman. <https://tarubali.baliprov.go.id/sekilas-bali/>
- Tim Cetak Fakta. (2022, January 14). *Pandemi Sudah Hampir 2 Tahun, Kenapa Hoaks Covid-19 Masih Bermunculan?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/14/090900682/pandemi-sudahhampir-2-tahun-kenapa-hoaks-covid-19-masih-bermunculan?page=all>
- Tim Detikcom. (2021, September 27). *Nadiem Luruskan Soal 2,8% Sekolah Jadi Klaster Corona: Banyak Error-nya*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5742472/nadiem-luruskan-soal-28-sekolah-jadi-klaster-corona-banyak-error-nya>
- Vlesia, V. (2021, February 9). *Pentingnya Pers Ditengah Pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur*. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. <https://portal.beltim.go.id/2021/02/09/pentingnya-pers-ditengah-pandemi-covid19/>

Yunita. (2017). *'Penyebaran Informasi Hoax Menimbulkan Keresahan di Masyarakat'*.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/9058/penyebaran-informasi-hoaxmenimbulkan-keresahan-di-masyarakat/0/sorotan_media





LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara

Narasumber (N)

Pewawancara (P)

P : Selamat pagi, Pak.

N : Ya, hallo selamat pagi juga.

P : Perkenalkan saya Ade, mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP UAJY yang saat ini sedang melakukan penelitian berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Bali dan berita hoaks karena klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka.

N : Baik Ade, silahkan.

P : Oke Pak langsung saja, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, nama, jabatan, dan sudah berapa tahun menjabat di Pemerintah Daerah Bali?

N : Ya, halo, saya Adhi Tiana Putra, selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Jabatan saya itu sudah saya jalani kurang lebih selama 5 tahun.

P : Lama ya Pak?

N : Ya, lumayan. Hehehe

P : Oke Pak Adhi, saya langsung ke pertanyaan inti boleh?

N : Ya boleh, silahkan.

P : Oke pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana pemberitaan hoaks yang saat ini terjadi mengenai COVID-19, khususnya klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Pemberitaannya tidak memiliki hubungan logis dan terkesan mencari kebetulan.

P : Bagaimana Pemerintah Bali menanggapi berita hoaks tentang adanya klaster baru akibat pemberlakuan sekolah tatap muka?

N : Pemerintah Provinsi Bali mengimbangi dengan data yang terkait dengan sekolah tatap muka seperti jumlah tenaga pendidik dan siswa yang sudah divaksin Covid19 dan penerapan protokol kesehatan di sekolah.

P : Lalu menurut Bapak, bagaimana masyarakat khususnya di Bali dalam menanggapi berita hoaks tentang kasus klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Masyarakat seharusnya dapat menunda untuk segera menyebarkan berita yang diterima, melakukan uji silang terkait fakta ke sumber-sumber terpercaya.

P : Menurut Bapak, apa akibat bagi masyarakat dari adanya pemberitaan hoaks ini khususnya di Bali?

N : Masyarakat menjadi tergiring ke opini-opini yang tidak berdasar atau tidak berdasar kuat yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

P : Selanjutnya, akan lebih membahas mengenai keterkaitan dengan komunikasi krisis ya Pak.

N : Ya, oke siap.

P : Apakah Pemerintah Daerah Bali memandang situasi ini sebagai situasi yang krisis, kalau iya dimana letak krisisnya?

N : Hm.. Sebenarnya, keadaan ini tidak merupakan situasi krisis.

P : Berarti menurut bapak situasi ini bukan situasi yang krisis sehingga tidak terjadi hoaks mengenai adanya klaster baru akibat sekolah tatap muka ya, Pak?

N : Iya benar, karena kami tidak berpikir itu situasi krisis.

P : Berarti Pak, Pemerintah Daerah Bali pun tidak memiliki cara untuk menanggulangi situasi yang krisis ya?

N : Iya, tidak.

P : Lalu, bagaimana cara Pemerintah Bali dalam menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat karena adanya hoaks klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Ya, melakukan penyampaian pesan yang mengimbangi kabar-kabar hoaks beredar dengan menyajikan info berdasar fakta melalui berbagai media.

P : Bagaimana cara Pemerintah Bali untuk konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ditengah situasi hoaks klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Hal itu dapat dilakukan secara konsisten memantau kabar yang beredar yang berpotensi atau sudah meresahkan masyarakat dengan info yang faktual melalui berbagai media.

P : Menurut Bapak, apakah Pemerintah Bali sudah terbuka dalam penyampaian segala bentuk informasi yang berkaitan dengan adanya klaster baru akibat pemberlakuan kemabli sekolah tatap muka ini?

N : Tentu sudah.

P : Nah Pak, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, untuk pertanyaan mengenai situasi krisis dan strategi komunikasi manajemen, serta komunikasi krisis. Apakah betul bukan ranah Bapak sebagai BPBD?

N : Ya, benar. Jadi, saya tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Silahkan Ade dapat menanyakan ke narasumber lainnya ya.

P : Oke baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya.

N : Iya, Ade sama-sama. Semangat *nggih*.

P : Terima kasih Pak.

Lampiran II Transkrip Wawancara

Narasumber (N)

Pewawancara (P)

N : Hallo selamat siang.

P : Hallo selamat siang, *om swastiastu* Pak.

N : Swastiastu, De..

P : *Nggih..* Perkenalkan saya Ade, dari Atma Jaya Yogyakarta. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan ilmu komunikasi strategis. Bapak sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih karena saya boleh mengganggu jam kerja dan jam makan siang Bapak.

N : Silahkan..

P : *Nggih*, Bapak. Saya langsung ke pertanyaannya saja ya Pak.

N : Iya.

P : Bapak sebelumnya, nama lengkapnya siapa ya Pak?

N : I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos,

P : Oke, berarti jabatan Bapak sebagai Kabid?

N : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar.

P : Mohon maaf sebelumnya, sudah berapa tahun sudah menjabat?

N : Dari 2019.

P : Sudah lama ya, Pak.

N : Iya..

P : Oke siap Pak, langsung ke pertanyaan tentang berita *hoax* nya *nggih* Pak karena skripsi saya ini tentang berita *hoax* ya Pak.

N : Iya..

P : Menurut Bapak bagaimana pemberitaan *hoax* yang saat ini terjadi, mengenai COVID-19 yang kemarin terjadi, khususnya terhadap klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka gitu Pak?

N : Jadi gini, saya ada beberapa berita, nanti saya berikan saja.. Jadi kita lihat selama pandemi ini, informasi *hoax* tentang kesehatan itu meningkat, sehingga saya dengan komunitas, teman-teman anti *hoaks* menyebut bahkan ada istilahnya *infodemi*. Jadi itu informasi *hoaks* yang beredar selama pandemi itu cukup meresahkan, jadi akhirnya itu kita sebut sebagai *infodemi*. Jadi selama COVID itu, sebenarnya *hoaks* secara umum itu mengganggu secara finansial, karena dulu pada kasus gunung Agung di Bali itu gara-gara *hoaks* itu, kita hampir rugi sampai 11 triliun. Ini nanti habis ini saya kasih link-link nya, nanti kamu catat aja ya. Jadi *hoaks* COVID, kemudian gunung Agung dan dia juga meresahkan. Jadi secara psikososial itu membuat resah. Lalu, dengan adanya *hoaks* juga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Jadi isu yang sangat sensitif. Di Bali, khususnya sebagai daerah pariwisata itu, sangat rentang terhadap isu keamanan, kesehatan, dan kebencanaan. Jadi, kita berangkat dari situ.

Hoaks itu berbahaya, karena ya itu tadi, merugikan secara finansial, kemudian membuat teror secara psikososial, dan yang ketiga merugikan secara persatuan dan keamanan, karena *hoaks* juga mengandung adanya unsur SARA, kan bisa jadi fitnah. Nah di Bali ini, yang terkenal dengan pariwisatanya itu rentan terhadap isu yang sensitif tentang kesehatan, tentang keamanan, tentang kebencanaan. Nah inilah yang perlu diwaspadai untuk Bali khususnya. Selama COVID-19 itu memang Indonesia itu kreatif, jadi biasanya program yang akan dibuat itu, dibuat *hoaks* nya dulu, misalnya vaksinasi. Misalnya sudah mau dimulai, sudah mau dilakukan vaksinasi per tanggal sekian, pasti beberapa hari sebelumnya beredar itu *hoaks* vaksinasi. Jadi *hoaks* ini merugikan, membuat masyarakat takut dan khawatir sehingga kehilangan kesempatan terhadap program yang seharusnya mereka manfaatkan. Kayak vaksinasi itu, banyak sekali berita bohong yang beredar, misalnya habis vaksinasi jadi kejang, muntah-muntah, abis vaksinasi langsung meninggal. Padahal itu sebenarnya, video, foto dalam konteks lain.. Kan *hoaks* seperti itu, video, foto, dan narasi yang dimuat ulang tetapi

dalam konteks yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Dengan adanya hoaks yang beredar saat pandemi itu, bisa membahayakan, menghancurkan bahkan merusak, itu seperti penyakit gitu.

Ada pernyataan dari Presiden Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), mereka ini adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi digital, menyediakan tentang hoaks. Pada tahun 2021, yang berkaitan dengan hoaks itu hampir 395 jenis hoaks per bulan.

P : Wow, cukup besar ya Pak itu hitungannya.

N : Iya, betul. Jadi kalau diteliti dari statistik KOMINFO, pernah itu dari Januari sampai Februari, atau sampai Maret, itu mereka ada 1.500 hoaks udah di verifikasi, hampir sama dengan MAFINDO, itu rata-rata kalau misalnya ada 1.500 hoaks di 3 bulan, berarti 1 bulan ada 500 berita hoaks kan. Nah, itulah kreatifnya orang Indonesia.

P : Hehehe. Terlalu kreatif ya Pak.

N : Kategori hoaks itu kan ada 4 tuh. Ada yang sengaja membuat, ada yang tidak sengaja menyebarkan, gitu nanti anda pelajari saja lagi. Nah ini saya kasih link aja lewat chat, anda baca, pelajari berita-beritanya yang saya kasih ini.

Jadi intinya kami punya website untuk edukasi sebenarnya, jadi kami punya tim untuk mendeteksi ketika ada hoaks. Nah tim itu kemudian mengambil biasanya berita-berita hoaks, misalnya di Whatsapp, karena di Indonesia penggunaannya tinggi, dari platform-platform lainnya. Bahkan, di dunia peringkat ke-5. Nah dengan kepopuleran itu, jadinya penyebaran hoaks jadi sangat masif di Whatsapp. Jadi Whatsapp, itu tertinggi, karena itu *platform* yang digunakan orang-orang untuk berbagi informasi. Nah akhirnya dengan melihat hal tersebut, sekarang penyebaran informasi di Whatsapp, *forward message* itu sekarang dibatasi kan penyebarannya, dibatasi hanya sekali saja. Tapi bayangkan aja, kalau misalkan kita masuk ke satu Whatsapp, rata-rata isinya 250 orang, penyebaran hoaks itu seperti eksponensial, 2, 4, 6 kuadrat. Nah ketika kita verifikasi, verifikasinya tidak menyebar sama kayak gitu, kadang yang membaca hoaks sebenarnya ada yang tidak ikut menyebarkan. Itu jadi salah satu tantangan.

Jadi sebenarnya penyebaran hoaks itu melebihi deret ukur eksponensial, tetapi verifikasinya hanya 2 tambah 2, 2 tambah 4, itu aja. Padahal penyebarannya 2 kuadrat, 2x2, 4 kuadrat 16, dan sebagainya.

Nah, itu akhirnya kami mencoba untuk membuat website edukasi tangkal hoaks, saya udah share ke chat juga ya. Itu tabu, tangkal, dan analisa berita bohong kota Denpasar. Kita mencoba ini sebenarnya tujuannya edukasi yang preventif, karena kita di pemerintah kota sih kesulitan kalo penegakan hukum, itu kan ranah kepolisian. Nah kalau kita kan hanya bisa melakukan edukasi, tujuannya apa, karena supaya masyarakat lebih memahami literasi digital, jadi mereka tidak mudah membagikan hoaks, tidak mudah menyebarkan, tanpa sengaja, karena kadang-kadang tanpa sengaja. Karena kalau sekarang betul-betul modifikasinya bagus sekali, seolah pesannya positif, nasihat, lalu dikutip dari seorang dokter, tokoh, dan sebagainya.

P : Nah itu di grup keluarga biasanya, Pak.

N : Iya, betul. Jadi biasakan sekarang, kita latih sih dengan berkali-kali sosialisasi itu supaya tidak mudah untuk menerima, mempercayai dan menyebarkannya kembali. Harus selalu cek dan ricek. Nah, hoaks selama COVID ini memang tinggi sekali, tetapi setau saya tidak ada hoaks tentang penutupan sekolah akibat COVID itu, karena kami punya data, jadi begini mekanisme di sekolah itu penutupan atau pembukaan sekolah itu berdasarkan data. Data itu kita lakukan setiap jam 2 atau jam 3 sudah terkumpul, hari ini yang terverifikasi berapa orang. Jadi begitu kita tahu yang terverifikasi siswa sekolah, maka data itu langsung akan diambil dari pihak Dinas Pendidikan untuk disebar di sekolah itu untuk dilakukan penanganan secara lokal, apakah akan ditutup atau hanya siswa nya di isolasi atau seperti apa. Jadi sampai saat ini belum pernah ada terjadi adanya hoaks yang terkait dengan masa belajar *offline* sekolah karena memang penanganannya langsung berdasarkan kasus harian yang ada datanya, jadi tidak ada misalnya cerita bohong siswa A sekian orang terverifikasi, tentu tidak. Jadi kita pasti cek terlebih dahulu, setiap hari membuat data untuk konfirmasi ada yang positif, nah dari situ akan ketahuan apakah ini memang siswa disalah satu sekolah apa gimana.

Nah, begitu kita dapatkan datanya, kita langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan Dispora tentang langkah-langkah yang akan diambil, seperti tadi, apakah cukup hanya mengisolasi siswanya atau menutup sekolah. Karena kalau sampai ada penutupan sekolah yang rugi adalah siswa. Ya jadi sampai sekarang, saya belum pernah dengar ada hoaks covid di sekolah. Ya itu. Jadi prinsipnya ya satu, secara umum semasa COVID memang meningkat pesat, yang kedua hoaks semasa COVID itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program yang dilaksanakan, seperti vaksinasi misalnya. Karena banyak hoaks yang beredar, akhirnya masyarakat enggan. Nah kembali saya sampaikan, itu tadi, selama COVID, kemudian strategi krisis. Strategi krisis yang kami lakukan ketika kami menemukan hoaks, kami verifikasi bersama tim, kemudian kami *posting* di website tadi, lalu link *postingan* itu kami sebar ke Whatsapp Group, kemudian kami *posting* ke media sosial yang ada di kota Denpasar, resmi dari pemerintah Kota. Kita ada beragam media sosial, ada IG, ada Youtube, ada Facebook, ada Twitter, ada website.

P : Tapi itu semua jalan Pak, aplikasinya?

N : Iya, jalan.

P : Iya itu adalah media kami. Nah disana kami sebar secara serentak sehingga verifikasi atas hoaks itu bisa tersebar luas. Itu yang terkait dengan hoaks. Oke, saya kirimkan linknya ya.

N : Oke, ada lagi?

P : Oke Pak, berarti dari Dinas ini menganggap itu adalah situasi yang krisis ya Pak? Karena meresahkan, merugikan masyarakat ya Pak, *nggih?*

N : Iya meresahkan, merugikan, menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Merugikan masyarakat, karena kehilangan manfaat, dari yang seharusnya dia dapatkan, jadi gak jadi.

P : Iya tapi menurut Bapak, *apasih* yang menyebabkan krisis ini Pak, atau *apasih* yang menyebabkan hoaks ini ada di masyarakat kita?

N : Satu transformasi digital yang begitu pesat, hampir semua kehidupan sekarang bertransformasi ke digital. Nah, termasuk selama COVID, banyak sekali masyarakat kehilangan pekerjaan atau mungkin sebagian orang memiliki waktunya di rumah sehingga aktivitas mereka di media sosial tinggi. Nah begitu pesatnya perkembangan media sosial, khususnya di Denpasar, kalau tidak salah 8 jam per hari orang bermedia sosial, itu survei statistiknya ada. Kemudian, berdasarkan statistik di Indonesia, rata-rata satu orang itu menghabiskan waktu 30 jam per bulan. Ya, kalau Denpasar itu, 8 jam per hari, berdasarkan data statistik tahun 2020 sehingga itulah faktanya bahwa ternyata memang penggunaan internet udah melebihi, itu kan ada data terbaru, nanti saya berikan ya. Diingat ya catatannya berarti, data pengguna internet, lalu data statistik tentang penggunaan media sosial di Denpasar dan di Indonesia. Kalau melihat data statistik yang ada, kalau gak salah itu pengguna internet di Indonesia mencapai 170 juta, hampir jumlah penduduk Indonesia kan, sekitar 80-90 persen terkoneksi dengan internet. Bayangkan saja kalau sebagian besar dari pengguna koneksi internet tersebut adalah pengguna media sosial, nah dari situlah gimana hoaks bisa menyebar luas karena satu memang transformasi digital yang berkembang pesat, sedangkan masyarakat belum dibekali kecakapan digital yang memadai, jadi literasi digital itu penting untuk mereka memahami bagaimana seharusnya beraktivitas digital yang cakap, bijak dan berbudaya. Berdasarkan kementerian Kominfo, ada 3 poin memang yang perlu diwaspadai untuk diketahui. Cakap itu kan artinya memiliki pengetahuan ya, memiliki pemahaman, bagaimana seharusnya berinteraksi digital. Cakap, jadi dia punya pengetahuan, misalnya kalau ada pemberitaan apakah diterima dan dicek kembali, apakah bersifat kritis, atau bagaimana itu kan kecakapan. Lalu, bijak. Bijak itu kan menggunakan rasa, jadi kira-kira kalau ini diteruskan kira-kira mengganggu tidak, kira-kira kalau ini disebarkan akan menimbulkan keresahan tidak, ketidaknyamanan, jadi ada perasaan yang dilibatkan disana. Itu ya bijak, kirakira apakah bisa menakar tidak kira-kira hal tersebut baik atau buruk. Kalau tadi kan cakap, benar atau salah, kalau bijak, baik atau buruk, kira-kira ada yang terdampak tidak kalau disebarkan, ada yang tersakiti tidak. Begitu.. Itu bijak. Kemudian yang ketiga adalah

beretika atau berbudaya, jadi bagaimana berinteraksi secara digital itu berbudaya sesuai dengan adat ketimuran. Karena kan sekarang kan sering terjadi, demi konten, bikin macam-macam, ya itu. Jadi ini yang kita lihat bahwa masyarakat belum mempunyai kecakapan, kebijaksanaan dan etika dalam berinteraksi di dunia internet. Nah itulah penyebab hoaks, lalu muncul juga konten-konten yang kurang pantas. Muncul hal-hal yang harusnya tidak dipublikasikan, justru dipublikasi. Jadi karena kurangnya kecakapan masyarakat dalam literasi digital, dalam proses interaksi dengan dunia digital. Ini terjadi karena kecepatan perkembangan transformasi digital tidak seiring dengan pemahaman tentang bagaimana berinteraksi digital yang baik.

P : Oke berarti kan sebenarnya Pemerintah sudah berusaha menangani permasalahan tersebut kan Pak melalui sosial media dari Dinas itu kan Pak?

N : Iya jadi literasi digital itu kita lakukan adalah satu melalui media sosial juga, jadi kita sekarang perkuat lewat media sosial juga, karena media sosial jadi salah satu media yang efektif, dimana dapat dilihat dari kecepatan, responsif. Berbeda dengan media sebelumnya kan besok baru turun, kemudian tidak ada ruang untuk *feedback*. Nah kalau media sosial kan ada, begitu kita kirim, masyarakat kan langsung bisa memberikan tanggapan, nah itu. Jadi sekarang kita era nya adalah media sosial karena kecepatan, lalu ada *feedback* terhadap kebijakan kita, dan kita pun disana bisa mendapatkan masukan bagaimana seharusnya program ini dilakukan. Ketika program itu diluncurkan kadang ada respon dari masyarakat ya kita evaluasi lagi, perbaiki supaya lebih besar penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah. Lalu selain media sosial, kita juga menggunakan media tatap muka. Jadi, kita sering webinar, ke sekolah-sekolah untuk melakukan literasi digital. Kita sudah berkali-kali, dari 3 tahun yang lalu melakukan literasi media ketika MPLS. Nah kalau MPLS kan siswa-siwanya baru tuh, jadi kita wajibkan untuk sekolah-sekolah itu bahwa kita akan mengisi. Kalau kemarin ini terakhir, baru saja kita sekitar 3350 siswa di 17 sekolah, SMP, itu jadi selain menyasar siswa kita juga menyasar komunitas, PKK Desa, kelompok wanita Hindu, kemudian anak-anak remaja. Nah itulah kegiatan yang rutin kita lakukan, baik secara *offline* ke lokasi, maupun lewat webinar.

Lalu kegiatan sosialisasi itu kita mengajak komunitas, namanya komunitas MAFINDO sama Relawan TIK, itu yang sering kita ajak untuk melakukan literasi digital namanya. Jadi ada pemahaman tentang bagaimana literasi digital yang sehat, itu tadi cakap, bijak, dan berbudaya.

P : Bapak, berarti kalau hoaks-hoaks ini muncul, berarti siapa yang bertanggungjawab, ketika penyebarannya sudah luas, dengan informasi-informasi yang tidak benar? Berarti *kan*, yang bertanggung jawab atas berita hoaks ini, siapa Pak?

N : Ya sebenarnya kita semua, yang mengedarkan, yang membuat, yang membaca, ya seperti itu. Karena menurut saya, bisa dibilang, dunia digital ini ibarat samudera yang luas, ya kalau ikan-ikannya mau jungkir balik kita gak tahu tuh. Nah sekarang tinggal bagaimana supaya tidak bertabrakan ikan-ikannya harus seirama, searah. Begitu juga interaksi yang dilakukan di dunia digital, kita tidak akan mungkin misalnya mengatur semua orang mau dengan keinginan kita, yang hanya bisa kita berikan adalah rambu-rambu. Ini *lho* yang salah seperti ini, kalau berbuat salah akan merugikan seperti ini. Nah itu tugas pemerintah sebagai regulator, memberikan panduan, memberikan aturan. Kalau masyarakatnya tidak bisa diatur, ya jadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah kan tanggung jawabnya mengedukasi, itu sudah kita lakukan, kami lakukan edukasi di media sosial, melalui pertemuan-pertemuan tadi.. Sebenarnya ada dua, pertama preventif ini, edukasi, yang kedua adalah penegakan hukum. Nah penegakan hukum kan sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah, ada yang dilakukan dengan cara *takedown* misalnya, kemudian diproses secara pidana karena sudah ada UU ITE, dimana yang membuat dan menyebarkan akan kena.

P : Berarti *kan* melalui segala cara, online dan offline, berarti bagaimana pembagian kerja dari tim Bapak?

N : Kalau tim saya itu khusus tentang mendeteksi, mencari dimana munculnya hoaks. Lalu melakukan verifikasi, jadi ketika menerima hoaks langsung dikirimkan ke tim-nya ini hoaks atau tidak. Kemudian setelah terverifikasi, di *posting* di website, itu tim ketiga, tim publikasi. Nah begitu sudah muncul di website,

dikirimkan lagi ke Whatsapp Group, dimana muncul berita hoaks itu, supaya orang yang menerima hoaks tersebut mendapatkan konfirmasi bahwa berita tersebut adalah hoaks. Tujuannya adalah mereka tidak lagi menyebarkan berita itu. Kemudian, kita *posting* di media-media sosial kita. Jadi, masyarakat yang tidak terpapar hoaks tersebut, mengetahui, karena hoaks itu sifatnya, istilahnya hoaks lama bersemi kembali.. Hahah.. Karena satu bulan, dua bulan, nanti muncul lagi dan sudah dimodifikasi, biasanya judulnya diperbaiki, isinya ditambahkan.. Ya seperti itu mekanismenya..

P : Berarti ada tim masing-masing untuk menangani hoaks ya Pak? Hoaks COVID atau hoaks yang lainnya?

N : Iya, hoaks COVID atau apapun itu, kita punya tim nya.

P : Berarti kalau masyarakat itu sudah mulai khawatir, berarti tim dari Bapak langsung menyebarkan ke sosial media yang ada di pemerintah Denpasar ya Pak?

N : Iyak, benar.

P : Nah, selama COVID-19 ini kan pasti banyak beredar hoaks Pak. Itu Bapak bersama tim apakah pernah mengadakan konferensi pers mengenai hoaks ini?

N : Oh kalau konferensi pers dilakukan oleh Humas, itu ada setiap hari.. Biasanya tentang data, kalau ada hoaks juga pasti disampaikan dalam konferensi pers tersebut.

P : Tapi apakah konferensi pers tersebut masih tetap berpengaruh di masyarakat kita, di Denpasar?

N : Ya, saya kira masih karena itu dimuat oleh media-media online terkemuka. Jadi ya memang ada pembaca yang tinggi. Jadi, kalau di Humas, selain ada media sosial, ada media yang konvensional, misalnya televisi, koran, dan radio. Jadi ya kita memang menjangkau seluruh masyarakat dengan semua media yang ada, baik elektronik, konvensional, maupun media sosial.

P : Kalau konferensi pers biasanya digelar dimana Pak?

N : Kantor Walikota, itu setiap hari kok, dari juru bicara, dari pimpinan, apalagi tentang COVID-19 ini.

P : Berarti sejauh ini, Pemerintah tetap terbuka ya Pak akan berita-berita hoaks apa saja yang ada?

N : Tentunya. Karena kita kan tujuannya mengedukasi. Jadi ketika masyarakat menemui hoaks, supaya bisa berhati-hati..

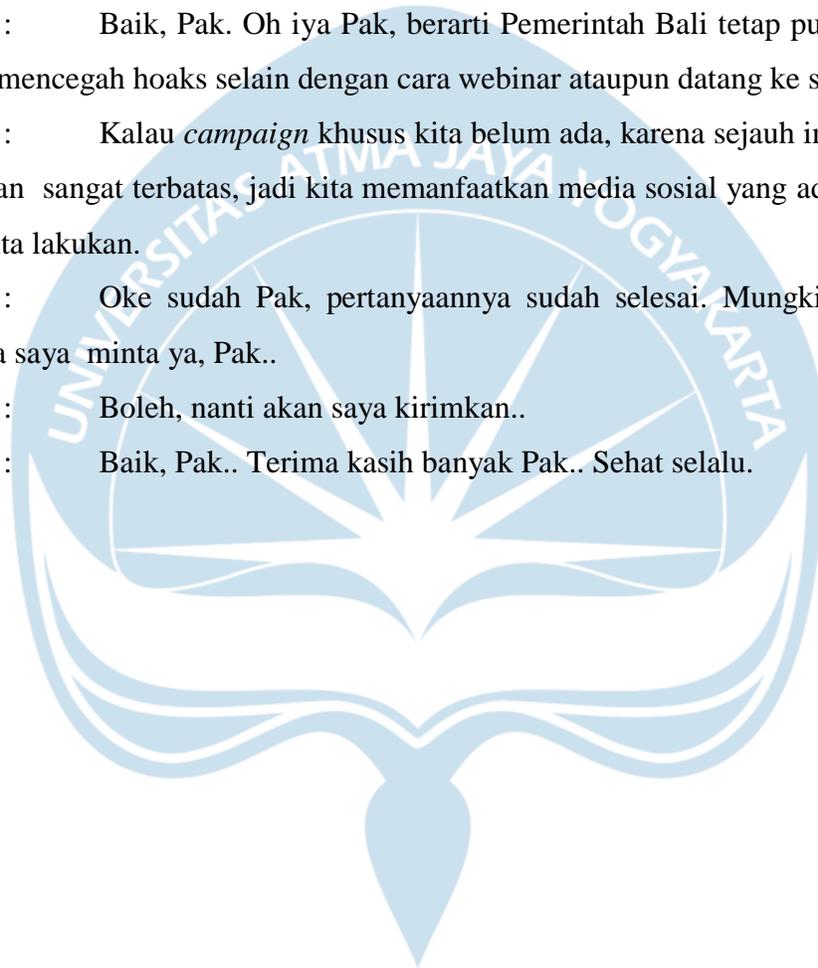
P : Baik, Pak. Oh iya Pak, berarti Pemerintah Bali tetap punya *campaign* untuk mencegah hoaks selain dengan cara webinar ataupun datang ke sekolah?

N : Kalau *campaign* khusus kita belum ada, karena sejauh ini ketersediaan anggaran sangat terbatas, jadi kita memanfaatkan media sosial yang ada, yang sudah rutin kita lakukan.

P : Oke sudah Pak, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin nanti untuk datanya saya minta ya, Pak..

N : Boleh, nanti akan saya kirimkan..

P : Baik, Pak.. Terima kasih banyak Pak.. Sehat selalu.



Lampiran III Transkrip Wawancara

P : Hallo, selamat siang Pak, terima kasih banyak Pak, sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini.

N : Ya, sama-sama.

P : Saya langsung mulai saja ya Pak.

N : Boleh.

P : Yang pertama mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya Pak, beserta jabatan dan job desk pekerjaan Bapak..

N : Nama saya Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si., saya adalah Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas.

P : Sudah berapa tahun menjabat sebagai humas di Pemerintah Daerah Bali?

N : Wah sudah lama, hmm.. Kurang lebih, 20 tahun lebih.

P : Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang sudah kita bicarakan, berarti untuk profil, struktur organisasi dan beberapa dokumentasi dapat saya lihat langsung di website dan media sosial akun Pemerintah Provinsi Bali?

N : Iya betul.

P : Oke baik, kalau begitu langsung masuk ke pertanyaan mengenai berita hoaks, ya

Pak. Menurut Bapak, bagaimana pemberitaan hoaks yang saat ini terjadi mengenai COVID-19, khususnya klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Di Pemprov Bali itu tidak terlalu banyak pengaruhnya salah satunya karena disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

P : Oke, lalu bagaimana Pemerintah Bali menanggapi berita hoaks tentang adanya klaster baru akibat pemberlakuan sekolah tatap muka?

N : Kami menjalin Kerjasama dengan semua jenis media untuk menangkal hoaks melalui pemberitaan positif terkait penanganan COVID-19.

P : Menurut Bapak, bagaimana masyarakat khususnya di Bali dalam menanggapi berita hoaks tentang kasus klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Tidak banyak pengaruhnya karena masyarakat disiplin serta sangat tanggap, bisa membedakan mana yang hoaks dan yang benar.

P : Lalu, apa akibat bagi masyarakat dari adanya pemberitaan hoaks ini khususnya di Bali?

N : Sebagian masyarakat terpengaruh juga akibat adanya berita hoaks..

P : Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pemerintah Daerah Bali memandang situasi ini sebagai situasi yang krisis, kalau iya dimana letak krisisnya?

N : Pemprov Bali memandang situasi ini dengan penuh kehati-hatian dan tetap cermat menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

P : Menurut Bapak, apakah yang menyebabkan situasi krisis ini, dalam hal ini adanya hoaks yang masih terjadi dengan adanya klaster baru akibat sekolah tatap muka?

N : Untuk Pemprov Bali itu, tidak banyak pengaruhnya..

P : Menurut Bapak, bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk menanggulangi situasi krisis ini?

N : Mengupayakan langkah-langkah strategis dalam penanganannya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.

P : Lalu, bagaimana cara Pemerintah Bali dalam menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat karena adanya hoaks klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Memanfaatkan semua sumber daya yang ada serta bekerjasama dg semua media untuk memberikan pemahaman yang benar terkait pandemi COVID-19..

P : Bagaimana cara Pemerintah Bali untuk konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ditengah situasi hoaks klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 sebagai tolok ukur dan pedomannya

P : Lalu, menurut anda, apakah Pemerintah Bali sudah terbuka dalam penyampaian segala bentuk informasi yang berkaitan dengan adanya klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka ini?

N : Sebenarnya Pemprov Bali sangat-sangat terbuka serta memanfaatkan semua saluran informasi.

P : Kemudian, menurut Bapak, siapa sajakah yang menjadi korban dari situasi seperti ini?

N : Masyarakat secara umum..

P : Apakah situasi seperti ini menjadi suatu peristiwa yang tidak sengaja? Dan menurut anda mengapa situasi ini dapat terjadi?

N : Iya, karena mungkin bisa jadi karena masyarakat sendiri ya yang kurang literasi.

P : Oke, lalu menurut Bapak, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala situasi yang terjadi dengan tetap adanya hoaks yang berkembang di masyarakat, khususnya di tengah adanya pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Semua pihak yg berkepentingan

P : Sejauh ini, apa yang sudah Pemerintah Daerah Bali lakukan untuk menanggapi situasi ini?

N : Mengambil langkah-langkah bijak yang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas..

P : Apa strategi yang sudah dilakukan dalam menghadapi situasi ini, dari pencegahan, persiapan dan penanggulangannya?

N : Salah satunya memanfaatkan semua sumber daya yg dimiliki..

P : Oke Bapak, selanjutnya media apa saja yang akhirnya dapat membantu Pemerintah Daerah Bali untuk menghadapi situasi ini?

N : Hampir semua media dilibatkan dan sangat membantu

P : Apa yang akhirnya Pemerintah Bali sampaikan kepada masyarakat melalui media

terkait situasi ini?

N : Semua hal terkait upaya-upaya yang dilaksanakan dalam penanganan COVID-19.

P : Lalu, siapa saja di Pemerintah Daerah Bali yang bertugas untuk menjalankan seluruh strategi ini dan bagaimana pembagian kerjanya?

N : Semua Organisasi Perangkat Daerah memainkan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya..

P : Lalu, bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk mengumpulkan fakta di tengah situasi hoaks klaster baru akibat pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?

N : Pemprov Bali membentuk Satgas yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data terkait penanganan COVID-19.

P : Bagaimana akhirnya cara penyampaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Bali setelah mengetahui fakta tersebut, agar masyarakat tidak panik dan khawatir?

N : Memanfaatkan semua media serta hirarki di pemerintahan formal maupun informal (Desa Adat)..

P : Apakah Pemerintah Daerah Bali melakukan konferensi pers? Kalau iya, kapan dan dimana, serta bagaimana pengaruhnya?

N : Disetiap kesempatan dan ada perkembangan regulasi selalu melaksanakan konpers..

P : Menurut Bapak, sejauh ini apakah Pemerintah Daerah Bali sudah secara terbuka dan tidak menutup informasi apapun berkaitan dengan adanya klaster baru akibat pemberlakuan sekolah tatap muka, tapi tetap tidak menurunkan reputasi Pemerintah Daerah Bali?

N : Pemprov Bali sangat terbuka terkait informasi penanganan COVID-19.

P : Apakah ada strategi sendiri dari Pemerintah Daerah Bali dalam menyampaikan informasi supaya tetap berhati-hati dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat?

N : Penyampaian informasi melalui Banjar dan desa adat sangat efektif dilaksanakan di Bali

P : Lalu, bagaimana upaya komunikasi *advocacy* atau meluruskan informasi hoaks yang sudah tersebar ditengah-tengah masyarakat?

N : Tetap melaksanakan pendekatan kekeluargaan

P : Bagaimana caranya supaya Pemerintah Daerah Bali dapat berempati terhadap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat ditengah situasi ini?

N : Pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19 dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas

P : Nah pertanyaan terakhir nih Bapak, Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali dalam hal menggunakan saluran komunikasi untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat?

N : Ya menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, serta memanfaatkan media semaksimal mungkin

P : Oke baik Bapak, sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya, sudah terjawab semua. Terima kasih

N : Siap, terima kasih juga. Semangat, cepat lulus

P : Amin, baik. Terima kasih

Lampiran IV Matriks Penelitian

Konsep/Teori	Pertanyaan	Sumber Informasi
Deskripsi Subjek dan Lokasi Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa nama narasumber?2. Apa jabatan narasumber di Pemerintah Daerah Bali?	Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali.

<p>Berita Hoaks</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, bagaimana pemberitaan hoaks yang saat ini terjadi mengenai COVID-19, khususnya klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka? 2. Bagaimana Pemerintah Bali menanggapi berita hoaks tentang adanya klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka? 3. Menurut anda, bagaimana masyarakat khususnya di Bali dalam menanggapi berita hoaks tentang kasus klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka? 4. Menurut anda, apa pada bagi masyarakat dari adanya pemberitaan hoaks ini khususnya di Bali? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara: Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali. 2. Dokumentasi: Pemberitaan mengenai Pemerintah Daerah Bali dalam Menangani Berita Hoaks klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka dan data Badan Pusat Statistik mengenai hoaks pada sekolah tatap muka.
---------------------	--	---

<p>Teori Komunikasi Krisis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pemerintah Daerah Bali memandang situasi ini sebagai situasi yang krisis, kalau iya dimana letak krisisnya? 2. Menurut anda, apakah yang menyebabkan situasi krisis ini, dalam hal ini adanya hoaks yang masih terjadi dengan adanya klaster baru pada sekolah tatap muka? 3. Bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk menanggulangi situasi krisis ini? 4. Bagaimana cara Pemerintah Bali dalam menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat karena adanya hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka? 5. Bagaimana cara Pemerintah Bali untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara: Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali. 2. Dokumentasi: Pemberitaan mengenai Pemerintah Daerah Bali dalam Menangani Berita Hoaks klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka dan data Badan Pusat Statistik mengenai hoaks pada sekolah tatap muka.
--------------------------------	--	---

	<p>konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ditengah situasi hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?</p> <p>6. Menurut anda, apakah Pemerintah Bali sudah terbuka dalam penyampaian segala bentuk informasi yang berkaitan dengan adanya klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka ini?</p>	
<p><i>Situational Crisis Communication Theory</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda sendiri, siapa sajakah yang menjadi korban dari situasi seperti ini? 2. Apakah situasi seperti ini menjadi suatu peristiwa yang tidak sengaja? Dan menurut anda mengapa situasi ini dapat terjadi? 3. Menurut anda, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara: Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali. 2. Dokumentasi: Pemberitaan mengenai Pemerintah Daerah Bali dalam Menangani Berita

	<p>siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala situasi yang terjadi dengan tetap adanya hoaks yang berkembang di masyarakat, khususnya ditengah adanya pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?</p>	<p>Hoaks klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka dan data Badan Pusat Statistik mengenai hoaks pada sekolah tatap muka.</p>
<p>Strategi Komunikasi Manajemen Krisis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh ini, apa yang sudah Pemerintah Daerah Bali lakukan untuk menanggapi situasi ini? 2. Apa strategi yang sudah dilakukan dalam menghadapi situasi ini, dari pencegahan, persiapan dan penanggulangannya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara: Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali. 2. Dokumentasi: Pemberitaan mengenai Pemerintah Daerah Bali dalam Menangani Berita Hoaks klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka dan data Badan Pusat Statistik mengenai hoaks pada sekolah tatap muka.

<p>Strategi Komunikasi Krisis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media apa saja yang akhirnya dapat membantu Pemerintah Daerah Bali untuk menghadapi situasi ini? 2. Apa yang akhirnya Pemerintah Bali sampaikan kepada masyarakat melalui media terkait situasi ini? 3. Siapa saja di Pemerintah Daerah Bali yang bertugas untuk menjalankan seluruh strategi ini dan bagaimana pembagian kerjanya? 4. Bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk mengumpulkan fakta ditengah situasi hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka? 5. Bagaimana akhirnya cara penyampaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali setelah mengetahui fakta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara: Humas Pemerintah Daerah Bali dan akan dilakukan wawancara kepada Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Bali. 2. Dokumentasi: Pemberitaan mengenai Pemerintah Daerah Bali dalam Menangani Berita Hoaks klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka dan data Badan Pusat Statistik mengenai hoaks pada sekolah tatap muka.
-----------------------------------	---	---

	<p>tersebut, agar masyarakat tidak panik dan khawatir?</p> <p>6. Apakah Pemerintah Daerah Bali melakukan konferensi pers? Kalau iya, kapan dan dimana, serta bagaimana pengaruhnya?</p> <p>7. Menurut anda, sejauh ini apakah Pemerintah Daerah Bali sudah secara terbuka dan tidak menutup informasi apapun berkaitan dengan adanya klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka, tapi tetap tidak menurunkan reputasi Pemerintah Daerah Bali?</p> <p>8. Apakah ada strategi sendiri dari Pemerintah Daerah Bali dalam menyampaikan informasi supaya tetap berhati-hati dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat?</p> <p>9. Bagaimana upaya</p>	
--	--	--

	<p>komunikasi <i>advocacy</i> atau meluruskan informasi hoaks yang sudah tersebar ditengah-tengah masyarakat?</p> <p>10. Bagaimana caranya supaya Pemerintah Daerah Bali dapat berempati terhadap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat ditengah situasi ini?</p> <p>11. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali dalam hal menggunakan saluran komunikasi untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat?</p>	
--	--	--

OPEN CODING

Narasumber:

1. Adhi Tiana Putra – Kepala Seksi Pengendalian Operasi UPTD, Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali (Kode: N1)
2. I Gde Wirakusuma Wahyudi S.Sos – Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Denpasar (Kode: N2)
3. Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si. – Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi / Humas (Kode: N3)

Peneliti (Kode: P)

Kode	Transkrip	Intisari	Topik & Konsep
P	Menurut anda, bagaimana pemberitaan hoaks yang saat ini terjadi mengenai COVID-19, khususnya klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?		

N1	<p>Pemberitaannya tidak memiliki hubungan logis dan terkesan mencari kebetulan.</p>	<p>Pemberitaan hoaks yang saat ini mengenai COVID-19 mengenai kluster pemberlakuan kembali sekolah tatap muka tidak memiliki hubungan logis dan cenderung mencari pembenaran.</p>	<p>Pemberitaan hoaks mencari pembenaran.</p>
N2	<p>Jadi kita lihat selama pandemi ini, informasi hoax tentang kesehatan itu meningkat, sehingga saya dengan komunitas, teman-teman anti hoaks menyebut bahkan ada istilahnya infodemi. Jadi itu informasi hoaks yang beredar selama pandemi itu cukup meresahkan, jadi akhirnya itu kita sebut sebagai infodemi. Jadi selama COVID itu,</p>	<p>Pemberitaan hoaks yang saat ini mengenai COVID-19 mengenai kluster pemberlakuan kembali sekolah tatap muka di Bali terus meningkat dan cukup meresahkan, bahkan menjadi infodemi. Selain itu, pemberitaan tersebut mengganggu secara finansial, hingga mengancam isu</p>	<p>Pemberitaan hoaks mengganggu berbagai aspek kehidupan di Bali.</p>

	<p>sebenarnya hoaks secara umum itu mengganggu secara finansial, karena dulu pada kasus gunung Agung di Bali itu gara-gara hoaks itu, kita hampir rugi sampai 11 triliun. Jadi secara psikososial itu membuat resah. Lalu, dengan adanya hoaks juga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Jadi isu yang sangat sensitif. Di Bali, khususnya sebagai daerah pariwisata itu, sangat rentang terhadap isu keamanan, kesehatan, dan kebencanaan.</p>	<p>kesehatan dan kebencanaan.</p>	
N3	<p>Di Pemprov Bali itu tidak terlalu banyak pengaruhnya salah satunya karena disiplin masyarakat dalam</p>	<p>Penerapan protokol kesehatan dapat membuat masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita hoaks</p>	<p>Penerapan protokol kesehatan mencegah pemberitaan hoaks</p>

	penerapan protokol kesehatan.	mengenai pemberlakuan kembali sekolah tatap muka	
P	Bagaimana Pemerintah Bali menanggapi berita hoaks tentang adanya klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka?		
N1	Pemerintah Provinsi Bali mengimbangi dengan data yang terkait dengan sekolah tatap muka seperti jumlah tenaga pendidik dan siswa yang sudah divaksin Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan di sekolah.	Pemerintah Bali melakukan pengimbangan pada data mengenai sekolah tatap muka, seperti jumlah tenaga pendidik dan siswa yang sudah divaksin COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan di Indonesia.	Pemerintah Bali menyeimbangkan antara data dan hoaks dari pemberlakuan sekolah tatap muka.
N2	Jadi intinya kami punya website untuk edukasi sebenarnya, jadi kami punya tim untuk	Pemerintah Bali memiliki website untuk mendeteksi berita hoaks,	Pemerintah Bali memanfaatkan kemajuan teknologi

	<p>mendeteksi ketika ada hoaks. Nah tim itu kemudian mengambil biasanya berita-berita hoaks, misalnya di Whatsapp, karena di Indonesia penggunaanya tinggi, dari platform-platform lainnya. Strategi krisis yang kami lakukan ketika kami menemukan hoaks, kami verifikasi bersama tim, kemudian kami posting di website tadi, lalu link postingan itu kami sebar ke Whatsapp Group, kemudian kami posting ke media sosial yang ada di kota Denpasar, resmi dari pemerintah Kota. Kita ada beragam media sosial, ada IG, ada Youtube, ada Facebook, ada Twitter, ada website.</p>	<p>sekaligus tim khusus untuk menangani adanya pemberitaan hoaks. Selain itu, memanfaatkan media sosial, seperti IG, Youtube, Facebook dan Twitter.</p>	<p>untuk menangani pemberitaan hoaks.</p>
--	---	---	---

N3	Kami menjalin kerjasama dengan semua jenis media untuk menangkal hoaks melalui pemberitaan positif terkait penanganan COVID-19.	Pemerintah Bali melakukan kerjasama dengan berbagai media untuk menanggapi pemberitaan hoaks.	Pemerintah Bali melakukan kerjasama dalam menangani hoaks.
P	Bagaimana masyarakat khususnya di Bali dalam menanggapi berita hoaks tentang kasus klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?		
N1	Masyarakat seharusnya dapat menunda untuk segera menyebarkan berita yang diterima, melakukan uji silang terkait fakta ke sumber-sumber terpercaya.	Masyarakat tidak boleh langsung menyebarkan berita yang didapatkan.	Berita hoaks tidak boleh disebarluaskan.
N2	Kita latih sih dengan berkali-kali sosialisasi itu supaya tidak mudah untuk menerima,	Masyarakat harus mengikuti sosialisasi mengenai berita hoaks, dan supaya	Sosialisasi sangat penting untuk mencegah berita hoaks.

N3	<p>mempercayai dan menyebarkannya kembali. Harus selalu cek dan ricek.</p> <p>Tidak banyak pengaruhnya karena masyarakat disiplin serta sangat tanggap, bisa membedakan mana yang hoaks dan yang benar.</p>	<p>mengerti apa yang harus dilakukan, termasuk selalu cek dan kebenaran suatu berita.</p> <p>Pemberitaan hoaks tidak ada pengaruh bagi masyarakat</p>	<p>Berita hoaks tidak memiliki pengaruh.</p>
P	<p>Apa dampak bagi masyarakat dari adanya pemberitaan hoaks ini khususnya di Bali?</p>		
N1	<p>Masyarakat menjadi tergiring ke opini-opini yang tidak berdasar atau tidak berdasar kuat yang menimbulkan keresahan di masyarakat.</p>	<p>Berita hoaks di Bali menyebabkan keresahan di masyarakat</p>	<p>Berita hoaks berdampak bagi masyarakat di Provinsi Bali</p>
N2	<p>Iya meresahkan, merugikan,</p>	<p>Berita hoaks di Bali menyebabkan</p>	<p>Berita hoaks berdampak bagi</p>

	<p>menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Merugikan masyarakat, karena kehilangan manfaat, dari yang seharusnya dia dapatkan, jadi gak jadi</p>	<p>keresahan dan merugikan masyarakat, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.</p>	<p>masyarakat di Provinsi Bali</p>
N3	<p>Sebagian masyarakat terpengaruh juga akibat adanya berita hoaks.</p>	<p>Sebagian masyarakat di Bali terdampak berita hoaks</p>	<p>Berita hoaks berdampak bagi sebagian masyarakat di Provinsi Bali</p>
P	<p>Apakah Pemerintah Daerah Bali memandang situasi ini sebagai situasi yang krisis, kalau iya dimana letak krisisnya?</p>		
N1	<p>Hm.. Sebenarnya, keadaan ini tidak merupakan situasi krisis.</p>	<p>Bukan situasi krisis</p>	<p>Situasi krisis tidak dialami.</p>
N2	<p>Iya meresahkan, merugikan, menurunkan kepercayaan masyarakat</p>	<p>Situasi krisis karena merugikan masyarakat.</p>	<p>Situasi krisis dialami masyarakat Provinsi Bali.</p>

	pesat, hampir semua kehidupan sekarang bertransformasi ke digital.	teknologi yang begitu pesat	
P	Bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk menanggulangi situasi krisis ini?		
N2	Iya jadi literasi digital itu kita lakukan adalah satu melalui media sosial juga, jadi kita sekarang perkuat lewat media sosial juga, karena media sosial jadi salah satu media yang efektif, dimana dapat dilihat dari kecepatan, responsif.	Salah satu upaya untuk menanggulangi situasi krisis adalah melalui literasi digital	Upaya menghadapi situasi krisis
N3	Mengupayakan langkah-langkah strategis dalam penanganannya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.	Pemerintah Bali mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19 sebagai langkah strategis untuk	Upaya menghadapi situasi krisis

		menanggulangi situasi krisis.	
P	Bagaimana cara Pemerintah Bali dalam menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat karena adanya hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?		
N1	Ya, melakukan penyampaian pesan yang mengimbangi kabar-kabar hoaks beredar dengan menyajikan info berdasar fakta melalui berbagai media.	Penyampaian pesan kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Bali melalui penyampaian berita dengan didasari fakta yang ada.	Penyampaian fakta mengenai situasi yang terjadi.
N2	Nah itu tugas pemerintah sebagai regulator, memberikan panduan, memberikan aturan. Pemerintah kan	Penyampaian pesan kepada masyarakat dilakukan melalui pemberian pedoman dan aturan, serta	Penyampaian fakta mengenai situasi yang terjadi.

N3	<p>tanggung jawabnya mengedukasi, itu sudah kita lakukan, kami lakukan edukasi di media sosial, melalui pertemuan-pertemuan tadi.</p> <p>Memanfaatkan semua sumber daya yang ada serta bekerjasama dengan semua media untuk memberikan pemahaman yang benar terkait pandemi COVID-19.</p>	<p>melakukan edukasi diberbagai media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Bali.</p> <p>Penyampaian pesan dilakukan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media untuk memberikan pemahaman yang benar.</p>	<p>Penyampaian fakta mengenai situasi yang terjadi.</p>
P	<p>Bagaimana cara Pemerintah Bali untuk konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ditengah situasi hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?</p>		

N1	<p>Hal itu dapat dilakukan secara konsisten</p> <p>memantau kabar yang beredar yang berpotensi atau sudah meresahkan masyarakat dengan info yang faktual melalui berbagai media.</p>	<p>Pemerintah Bali selalu memantau berbagai pemberitaan mengenai COVID-19.</p>	<p>Upaya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat secara konsisten.</p>
N2	<p>Kalau tim saya itu khusus tentang mendeteksi, mencari dimana munculnya hoaks. Lalu melakukan verifikasi, jadi ketika menerima hoaks langsung dikirimkan ke tim-nya ini hoaks atau tidak. Kemudian setelah terverifikasi, diposting di website, itu tim ketiga, tim publikasi. Nah begitu sudah muncul di website, dikirimkan lagi ke Whatsapp Group, dimana muncul berita hoaks itu, supaya</p>	<p>Pemerintah Bali melalui tim melakukan konsisten dengan langkah-langkah yang dilakukan, seperti mendeteksi, mencari, hingga verifikasi berita hoaks. Setelah langkah tersebut, barulah Pemerintah Provinsi Bali mengunggah di website untuk melakukan publikasi, serta mengirimkan pesan ke Whatsapp Grup</p>	<p>Upaya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat secara konsisten.</p>

	<p>orang yang menerima hoaks tersebut mendapatkan konfirmasi bahwa berita tersebut adalah hoaks. Kemudian, kita <i>posting</i> di media-media sosial kita. Jadi, masyarakat yang tidak terpapar hoaks tersebut, mengetahui, karena hoaks itu sifatnya, istilahnya hoaks lama bersemi kembali.. Hahah.. Karena satu bulan, dua bulan, nanti muncul lagi dan sudah dimodifikasi, biasanya judulnya diperbaiki, isinya ditambahkan.. Ya seperti itu mekanismenya.</p>	<p>untuk menjelaskan bahwa berita yang beredar adalah hoaks.</p>	
N3	<p>Mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 sebagai tolok ukur dan pedomannya</p>	<p>Pemerintah Provinsi Bali dengan konsisten mengutamakan penerapan protokol</p>	<p>Upaya penyampaian pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah situasi krisis.</p>

		kesehatan COVID-19 sebagai pedoman guna menangkal hoaks.	
P	Apakah Pemerintah Bali sudah terbuka dalam penyampaian segala bentuk informasi yang berkaitan dengan adanya klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka ini?		
N2	Ya, konferensi pers dilakukan oleh Humas, itu ada setiap hari.. Biasanya tentang data, kalau ada hoaks juga pasti disampaikan dalam konferensi pers tersebut.	Dalam hal penyampaian informasi mengenai adanya hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka disampaikan melalui konferensi pers.	Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani penyebaran berita hoaks sangat terbuka.
N3	Sebenarnya Pemprov Bali sangat-sangat terbuka serta	Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka akan segala bentuk	

	memanfaatkan semua saluran informasi.	penyampaian informasi.	
P	Siapa sajakah yang menjadi korban dari situasi seperti ini?		
N2	Seluruh pihak, masyarakat hingga pemerintah. sebenarnya hoaks secara umum itu mengganggu secara finansial. Jadi secara psikososial itu membuat resah. Lalu, dengan adanya hoaks juga mengancam isu kesehatan dan kebencanaan. Jadi isu yang sangat sensitif. Di Bali, khususnya sebagai daerah pariwisata itu, sangat rentang terhadap isu keamanan, kesehatan, dan kebencanaan. Jadi, kita berangkat dari situ.	Pemberitaan hoaks yang beredar tentunya pemerintah dan masyarakat menjadi korban. Hal tersebut berdampak dari finansial hingga psikososial.	Jenis krisis berdasarkan korban terjadi karena penyebaran berita hoaks di Provinsi Bali.

N3	Masyarakat secara umum...	Pemberitaan hoaks menjadikan masyarakat secara umum menjadi korban.	
P	Apakah situasi seperti ini menjadi suatu peristiwa yang tidak sengaja? Dan menurut anda mengapa situasi ini dapat terjadi?		
N2	Kategori hoaks itu kan ada 4 tuh. Ada yang sengaja membuat, ada yang tidak sengaja menyebarkan. Satu transformasi digital yang begitu pesat, hampir semua kehidupan sekarang bertransformasi ke digital . Nah, termasuk selama COVID, banyak sekali masyarakat kehilangan pekerjaan atau mungkin sebagian orang memiliki	Situasi ini terjadi akibat perkembangan digital yang begitu pesat, apalagi selama COVID-19 pengguna internet pun terus meningkat yang tidak diimbangi oleh literasi digital masyarakat belum cukup.	Situasi ini menjadi jenis krisis yang terjadi karena perkembangan sekitar, baik disengaja ataupun tidak disengaja.

	<p>waktunya di rumah sehingga aktivitas mereka di media sosial tinggi. Bayangkan saja kalau sebagian besar dari pengguna koneksi internet tersebut adalah pengguna media sosial, nah dari situlah gimana hoaks bisa menyebar luas karena satu memang transformasi digital yang berkembang pesat, sedangkan masyarakat belum dibekali kecakapan digital yang memadai, jadi literasi digital itu penting untuk mereka memahami bagaimana seharusnya beraktivitas digital yang cakap, bijak dan berbudaya.</p>		
N3	<p>Iya, karena mungkin bisa jadi karena masyarakat sendiri ya yang kurang literasi.</p>	<p>Masyarakat yang kurang literasi memicu kesengajaan adanya penyebaran</p>	<p>Situasi krisis yang disengaja.</p>

		hoaks di Provinsi Bali.	
P	Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala situasi yang terjadi dengan tetap adanya hoaks yang berkembang di masyarakat, khususnya ditengah adanya pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?		
N2	Ya sebenarnya kita semua , yang mengedarkan, yang membuat, yang membaca, ya seperti itu.	Dengan adanya penyebaran berita hoaks menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang mengedarkan, membuat dan membaca	Seluruh pihak harus bertanggung jawab terhadap situasi krisis yang terjadi, atas penyebaran berita hoaks.
N3	Semua pihak yang berkepentingan	Seluruh pihak yang berkepentingan harus bertanggung jawab atas segala situasi dengan	

		tersebar pemberitaan hoaks.	
P	Media apa saja yang akhirnya dapat membantu Pemerintah Daerah Bali untuk menghadapi situasi ini?		
N2	Kita ada beragam media sosial , ada IG, ada Youtube, ada Facebook, ada Twitter, ada website.	Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan akun di media sosial serta website untuk membantu menangani penyebaran hoaks ditengah masyarakat.	Penggunaan media sebagai strategi komunikasi krisis
N3	Hampir semua media dilibatkan dan sangat membantu	Hampir seluruh media dilibatkan untuk menghadapi situasi ini.	
P	Apa yang akhirnya Pemerintah Bali sampaikan kepada masyarakat melalui media terkait situasi ini?		

N2	Terdapat tim yang khusus menangani hoaks untuk menyebarkan ke sosial media yang ada di Pemerintah Denpasar bahwa berita tersebut tidak benar.	Pemerintah Provinsi Bali melalui tim khusus menyampaikan kepada masyarakat bahwa berita tersebut adalah hoaks.	Penyampaian fakta atas situasi yang terjadi melalui media.
N3	Semua hal terkait upaya-upaya yang dilaksanakan dalam penanganan COVID-19.	Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani situasi COVID-19.	
P	Siapa saja di Pemerintah Daerah Bali yang bertugas untuk menjalankan seluruh strategi ini dan bagaimana pembagian kerjanya?		
N2	Terdapat tim khusus untuk menangani hoaks. Jadi intinya kami punya website untuk edukasi sebenarnya, jadi	Pemerintah Provinsi Bali memiliki tim khusus untuk menangani hoaks, dengan pembagian	Tim Komunikasi khusus untuk melakukan perencanaan yang terkoordinasi dalam

N3	<p>kami punya tim untuk mendeteksi ketika ada hoaks. Nah tim itu kemudian mengambil biasanya berita-berita hoaks.</p> <p>Semua Organisasi Perangkat Daerah memainkan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya..</p>	<p>kerja masing-masing sesuai proses pendeteksian hoaks hingga mencari beritanya.</p> <p>Seluruh organisasi yang merupakan Perangkat Daerah Bali wajib menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai peran masing-masing dalam menangani penyebaran berita hoaks.</p>	<p>pembagian kerja untuk menangani situasi krisis.</p>
P	<p>Bagaimana cara Pemerintah Daerah Bali untuk mengumpulkan fakta ditengah situasi hoaks klaster baru pada pemberlakuan kembali sekolah tatap muka?</p>		
N2	<p>Nah tim itu kemudian mengambil biasanya</p>	<p>Pemerintah Provinsi Bali memiliki</p>	<p>Pentingnya pengumpulan fakta</p>

	<p>berita-berita hoaks, misalnya di Whatsapp, karena di Indonesia penggunaanya tinggi, dari platform-platform lainnya. Bahkan, di dunia peringkat ke-5. Nah dengan kepopuleran itu, jadinya penyebaran hoaks jadi sangat masif di Whatsapp. Jadi Whatsapp, itu tertinggi, karena itu <i>platform</i> yang digunakan orang-orang untuk berbagi informasi. Nah akhirnya dengan melihat hal tersebut, sekarang penyebaran informasi di Whatsapp, <i>forward message</i> itu sekarang dibatasi kan penyebarannya, dibatasi hanya sekali saja. Tapi bayangkan aja, kalau misalkan kita masuk ke satu Whatsapp, rata-rata</p>	<p>langkah khusus untuk mengumpulkan fakta ditengah situasi hoaks klaster baru pemberlakuan sekolah tatap muka, salah satunya mengambil berita hoaks terlebih dahulu yang ada di Whatsapp karena penyebarannya sangat massif pada aplikasi tersebut.</p>	<p>dalam strategi komunikasi krisis.</p>
--	--	--	--

N3	<p>isinya 250 orang, penyebaran hoaks itu seperti eksponensial, 2, 4, 6 kuadrat. Nah ketika kita verifikasi, verifikasinya tidak menyebar sama kayak gitu, kadang yang membaca hoaks sebenarnya ada yang tidak ikut menyebarkan. Itu jadi salah satu tantangan. Jadi sebenarnya penyebaran hoaks itu melebihi deret ukur eksponensial, tetapi verifikasinya hanya 2 tambah 2, 2 tambah 4, itu aja. Padahal penyebarannya 2 kuadrat, 2x2, 4 kuadrat 16, dan sebagainya.</p> <p>Pemprov Bali membentuk Satgas yang mempunyai tugas mengumpulkan dan</p>	<p>Pembentukan Tim Satgas seara khusus mempunyai tanggung jawab</p>	
----	--	---	--

	mengolah data terkait penanganan COVID-19.	dalam mengumpulkan dan mengolah data terkait penanganan COVID-19.	
P	Bagaimana akhirnya cara penyampaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali setelah mengetahui fakta tersebut, agar masyarakat tidak panik dan khawatir?		
N2	Strategi krisis yang kami lakukan ketika kami menemukan hoaks, kami verifikasi bersama tim, kemudian kami <i>posting</i> di website tadi, lalu link <i>postingan</i> itu kami sebar ke Whatsapp Group, kemudian kami <i>posting</i> ke media sosial yang ada di kota Denpasar, resmi dari pemerintah Kota. Kita	Dengan adanya pengumpulan fakta, terdapat langkah selanjutnya yang harus dilakukan, seperti verifikasi bersama tim khusus, mengunggah hasil verifikasi tersebut dan disebarluaskan ke Whatsapp Group. Kemudian, mengunggah berita yang benar ke media	Pengumpulan fakta yang ada tetap membutuhkan media dalam penyebarannya.

N3	<p>ada beragam media sosial, ada IG, ada Youtube, ada Facebook, ada Twitter, ada website.</p> <p>Memanfaatkan semua media serta hirarki di pemerintahan formal maupun informal (Desa Adat).</p>	<p>sosial hingga website resmi Pemerintah Denpasar.</p> <p>Setelah mengetahui fakta, Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan media dan hirarki di Pemerintah, baik formal maupun informal untuk menyampaikan kepada masyarakat</p>	
P	<p>Apakah Pemerintah Daerah Bali melakukan konferensi pers? Kalau iya, kapan dan dimana, serta bagaimana pengaruhnya?</p>		
N2	<p>Oh kalau konferensi pers dilakukan oleh Humas, itu ada setiap hari.. Biasanya tentang data, kalau ada hoaks</p>	<p>Konferensi Pers dilakukan secara berkala oleh Humas, untuk menyampaikan data-</p>	<p>Pelaksanaan konferensi pers secara berkala dilakukan sebagai</p>

N3	<p>juga pasti disampaikan dalam konferensi pers tersebut.</p> <p>Disetiap kesempatan dan ada perkembangan regulasi selalu melaksanakan kongpers..</p>	<p>data hingga adanya pemberitaan hoaks.</p> <p>Konferensi Pers dilaksanakan setiap ada kesempatan dan perkembangan regulasi.</p>	<p>strategi komunikasi krisis.</p>
P	<p>Menurut anda, sejauh ini apakah Pemerintah Daerah Bali sudah secara terbuka dan tidak menutup informasi apapun berkaitan dengan adanya klaster baru pada pemberlakuan sekolah tatap muka, tapi tetap tidak menurunkan reputasi Pemerintah Daerah Bali?</p>		
N2	<p>Tentunya. Karena kita kan tujuannya mengedukasi. Jadi ketika masyarakat</p>	<p>Pemerintah Provinsi Bali secara terbuka menyampaikan berbagai informasi,</p>	<p>Memberikan informasi secara adil, baik positif maupun negatif</p>

	<p>atau tidak. Kemudian setelah terverifikasi, diposting di website, itu tim ketiga, tim publikasi. Nah begitu sudah muncul di website, dikirimkan lagi ke Whatsapp Group, dimana muncul berita hoaks itu, supaya orang yang menerima hoaks tersebut mendapatkan konfirmasi bahwa berita tersebut adalah hoaks. Tujuannya adalah mereka tidak lagi menyebarkan berita itu.</p> <p>Penyampaian informasi melalui Banjar dan desa adat sangat efektif dilaksanakan di Bali</p>	<p>munculnya hoaks. Selain itu, melakukan verifikasi sehingga masyarakat dapat diberikan konfirmasi mengenai benar/tidak informasi yang beredar sehingga masyarakat tidak akan menyebarkan berita tersebut.</p> <p>Pemerintah Daerah Bali memanfaatkan relasi di desa adat dan Banjar dalam penyampaian pesan dengan hati-hati kepada masyarakat. Hal tersebut sangat efektif.</p>	
--	---	--	--

P	Bagaimana upaya komunikasi <i>advocacy</i> atau meluruskan informasi hoaks yang sudah tersebar ditengah-tengah masyarakat?		
N2	Jadi kita memanfaatkan media sosial yang ada , yang sudah rutin kita lakukan.	Pemerintah Provinsi Bali memanfaatkan media sosial dalam upaya komunikasi <i>advocacy</i> ketika hoaks telah menyebar ditengah masyarakat.	Strategi komunikasi krisis dilakukan melalui komunikasi reputasi yaitu meluruskan informasi yang salah.
N3	Tetap melaksanakan pendekatan kekeluargaan	Pemerintah Provinsi Bali melakukan pendekatan kekeluargaan dalam meluruskan informasi hoaks yang telah beredar ditengah-tengah masyarakat.	
P	Bagaimana caranya supaya Pemerintah		

<p>N2</p>	<p>Daerah Bali dapat berempati terhadap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat ditengah situasi ini?</p> <p>Jadi, kalau di Humas, selain ada media sosial, ada media yang konvensional, misalnya televisi, koran, dan radio. Jadi ya kita memang menjangkau seluruh masyarakat dengan semua media yang ada, baik elektronik, konvensional, maupun media sosial.</p>	<p>Pemerintah Daerah Bali memanfaatkan berbagai media yang ada untuk menjangkau seluruh masyarakat, termasuk elektronik, konvensional, maupun media sosial sebagai langkah empati kepada masyarakat.</p>	<p>Menerapkan komunikasi empati dalam strategi komunikasi krisis.</p>
<p>N3</p>	<p>Pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19 dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.</p>	<p>Pemerintah Daerah Bali tetap berempati kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.</p>	
<p>P</p>	<p>Apa saja yang sudah</p>		

<p>N2</p>	<p>dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali dalam hal menggunakan saluran komunikasi untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat?</p> <p>Nah itu tugas pemerintah sebagai regulator, memberikan panduan, memberikan aturan. Pemerintah kan tanggung jawabnya mengedukasi, itu sudah kita lakukan, kami lakukan edukasi di media sosial, melalui pertemuan-pertemuan tadi.. Sebenarnya ada dua, pertama preventif ini, edukasi, yang kedua adalah penegakan hukum. Nah penegakan hukum kan sudah mulai dilakukan oleh</p>	<p>Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal menggunakan saluran komunikasi untuk menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagai regulator, yaitu memberikan panduan dan aturan. Selain itu, terdapat dua upaya lainnya yaitu edukasi melalui media sosial</p>	<p>Pemerintah Daerah Bali memperbanyak saluran komunikasi.</p>
-----------	--	---	--

	<p>Pemerintah, ada yang dilakukan dengan cara <i>takedown</i> misalnya, kemudian diproses secara pidana karena sudah ada UU ITE, dimana yang membuat dan menyebarkan akan kena.</p> <p>Ya menggunakan segala sumber daya yang dimiliki, serta memanfaatkan media semaksimal mungkin</p>	<p>serta sosialisasi dan penegakan hukum melalui UU ITE yang berlaku.</p> <p>Pemerintah Daerah Bali menggunakan segala sumber daya serta media dengan semaksimal mungkin sebagai upaya dalam menggunakan saluran komunikasi.</p>	
--	---	--	--